



KERJASAMA *GENERAL SECURITY OF MILITARY INFORMATION AGREEMENT (GSOMIA)* KOREA SELATAN-JEPANG 2016 : PERSPEKTIF KOREA SELATAN

Ngafifatul Khanafi¹, Erna Kurniawati²,

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/ Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Yogyakarta

*Email : 151180019@student.upnyk.ac.id

Email : erna.kurniawati@upnyk.ac.id

Abstrak

Kerjasama *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)* merupakan kerjasama militer antara Korea Selatan dan Jepang. Pada mulanya kerjasama tersebut akan dilaksanakan pada era Presiden Lee Myung-bak, akan tetapi kerjasama tersebut gagal dilaksanakan karena adanya penolakan dari pihak domestik Korea Selatan. Pada tahun 2016, kerjasama tersebut kembali dibahas pada era Presiden Park Geun-hye. Pihak domestik Korea Selatan tidak menyetujui kerjasama tersebut, akan tetapi Presiden Park Geun-hye tetap menandatangani pada November 2016. Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang Presiden Park Geun-hye menyepakati kerjasama tersebut. Adapun metode penelitian dilakukan dengan *library research*, dan analisis menggunakan Teori Model Aktor Rasional oleh Graham T Allison. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua alasan bagi Korea Selatan menyepakati GSOMIA, yakni kemampuan militer Jepang dan adanya peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara di Kawasan Asia Timur, khususnya Semenanjung Korea.

Kata kunci: *GSOMIA*, Kerjasama Militer, Korea Selatan, Jepang

Abstract

The General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) is a military cooperation between South Korea and Japan. Initially, the cooperation was to be carried out in the era of President Lee Myung-bak, but the cooperation failed to be implemented due to resistance from the South Korean domestic side. In 2016, the planning of the cooperation was rediscussed in the Park Geun-hye's era. Although some of the South Korea's people opposed to the cooperation, due to the history of Japan – South Korea relations in the past, however Park Geun-hye decided in signing the agreement on November 2016. This study aims to find out the background of Park Geun-hye agreeing to the cooperation. The research method was carried out with library research, and the analysis used the Model of Rational Actors Theory by Graham T Allison. Research shows





that there are two reasons for South Korea government to agree GSOMIA, due to Japan's military capabilities, and the increase in North Korea's nuclear and missile activities in East Asia region, especially in Korean Peninsula.

Keywords : *GSOMIA, Military Cooperation, South Korea, Japan.*

Pendahuluan

Korea Selatan dan Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki hubungan yang rumit. Wilayah Korea Selatan dan Jepang terletak berdekatan secara geografis di kawasan Asia Timur. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat kondisi hubungan kedua negara harmonis. Ketegangan hubungan kedua negara diakibatkan oleh sejarah di masa lalu pasca Jepang menjajah Korea Selatan dari tahun 1910 hingga 1945. Pada masa kelam tersebut, masyarakat Korea Selatan menyebutnya sebagai “*The Dark Days*” atas perlakuan kejam Jepang terhadap masyarakat Korea Selatan. Perlakuan Jepang di masa lalu membuat publik Korea Selatan merasa marah dan kecewa, terlebih perselisihan antara Jepang dan Korea Selatan tidak hanya sekali. (Yoon, Yang Seung dan Setiawati, 2003)

Akibat dari isu-isu sejarah yang kian berkembang di tengah masyarakat Korea Selatan, sehingga muncul istilah sentimen anti-Jepang. Sentimen anti-Jepang menggambarkan perspektif buruk masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang. Perspektif negatif masyarakat Korea Selatan terhadap isu sejarah menempati posisi tertinggi dalam survei yang dilakukan oleh *The Genron NPO* dan *East Asia Institute* (EAI) sebagai lembaga survei di kawasan Asia Timur. Survei tersebut dilakukan untuk melihat impresi Korea Selatan terhadap Jepang. Data menunjukkan sejumlah 77% masyarakat Korea Selatan menganggap negatif Jepang karena Jepang dianggap tidak memberikan permintaan maaf yang tulus terkait isu sejarah seperti isu *comfort women*. Sedangkan pada isu sengketa Pulau Dokdo 84,4%. Serta pada isu diskriminasi sejumlah 8,20%. Hal ini menunjukkan bahwa isu sejarah merupakan faktor utama pandangan negatif masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang. (Genron NPO, 2013)

Terlepas dari buruknya hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang. Korea Selatan dan Jepang memiliki satu ancaman yang sama yakni dari Korea Utara. Korea Utara yang gencar melakukan provokasi untuk mengembangkan nuklir mengancam Korea Selatan sebagai negara yang secara langsung berkonflik dengan Korea Utara. Korea Utara dianggap menjadi ancaman kemanana yang paling mengkhawatirkan di kawasan Asia Timur karena adanya peluang terjadinya perang nuklir. Baik Korea Selatan maupun Jepang melihat adanya urgensi keamanan di kawasan Semenanjung Korea yang sangat penting karena menyangkut keamanan negara. Dengan adanya urgensi keamanan ini membuat Korea Selatan dan Jepang membuka peluang untuk melakukan kerjasama militer. (Al Syahrin, 2018)





Pembahasan mengenai kerjasama militer antara Korea Selatan dan Jepang menghasilkan kesepakatan *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA). GSOMIA merupakan kerjasama militer yang bertujuan untuk saling memberikan informasi intelijen yang bersifat rahasia. Informasi rahasia yang didapatkan oleh Korea Selatan dari Jepang maupun sebaliknya, digunakan untuk meminimalisir ancaman dari Korea Utara. GSOMIA secara spesifik merupakan sebuah perjanjian militer dengan metode berbagi informasi penting dapat berupa teknologi, strategi, kode *cryptographic*, atau sistem *code-deciphering*. Dalam penerapan kerjasama intelijen, GSOMIA termasuk dalam kerjasama intelijen dengan penyebaran informasinya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kedua negara (Jun, 2012).

Kesepakatan GSOMIA seharusnya ditandatangani pada tahun 2012, namun gagal dilaksanakan karena adanya sentimen anti-Jepang yang kuat di tengah masyarakat Korea Selatan. Kelompok masyarakat penolak GSOMIA dapat digolongkan menjadi dua yakni golongan konservatif dan liberal, kelompok konservatif berasal dari para solidaritas *comfort women* yang tidak menyetujui pemerintah Korea Selatan melakukan kerjasama GSOMIA dengan Jepang dengan alasan sejarah terkait masalah *comfort women* yang belum terselesaikan dengan baik oleh Jepang. Sedangkan, kelompok liberal ialah kelompok generasi muda yang menolak kerjasama GSOMIA karena adanya ketidakpercayaan kelompok liberal terhadap pemerintah. Disamping itu, kelompok masyarakat ini menolak kesepakatan GSOMIA juga disebabkan oleh pemerintah Korea Selatan yang cenderung tidak memperhatikan konsensus publik ketika membuat sebuah kebijakan. Bagi masyarakat Korea Selatan pemerintah seringkali membuat kebijakan kontroversial, seperti kebijakan impor daging sapi dari Amerika dan perjanjian bebas dagang dengan Amerika yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu (Sheen Seongho dan Jina Kim, 2012).

Selain itu, penolakan juga datang dari parlemen Korea Selatan yang menganggap tidak dilibatkan dalam kesepakatan GSOMIA, sehingga hal tersebut terkesan dirahasiakan. Parlemen juga menyebutkan bahwa Presiden Lee Myung Bak yang pada tahun tersebut menjabat, tidak mengikuti prosedur dengan memperhatikan arahan dari Majelis Nasional Korea. Atas desakan dari masyarakat Korea Selatan dan parlemen yang tidak menyetujui perjanjian GSOMIA menyebabkan perjanjian tersebut gagal ditandatangani satu jam sebelum resmi disepakati (Shin-H, 2012).

Ketidakpercayaan publik setelah permasalahan kerjasama GSOMIA menyebabkan kepemimpinan Lee Myung Bak mendapatkan tingkat dukungan masyarakat terhadap presiden rendah, yakni 26,1% dalam empat bulan terakhir (Jun, 2012). Selain itu, partai Saenuri sebagai partai pengusung Presiden Lee, juga cenderung memilih untuk mengikuti publik agar terhindar dari penurunan perolehan suara di tahun mendatang (Taqwim, 2019). Hal tersebut membuat Lee Myung Bak berusaha untuk memperbaiki hubungan domestik dengan merubah arah kebijakan yang sebelumnya pro Jepang menjadi sebaliknya dengan tujuan mendapatkan kembali simpati dari masyarakat Korea Selatan (Moon Chung-In dan Won Young Hur, 2017). Sebagai bentuk upaya





Presiden Lee mendapat simpati dari masyarakat Korea Selatan, Presiden Lee kemudian mengunjungi Pulau Dokdo yang merupakan pulau sengketa dengan Jepang. Namun, tindakan tersebut menyebabkan hubungan politik Korea-Selatan dan Jepang semakin memburuk. Selain itu, Presiden Lee juga kerap memberikan pernyataan-pernyataan yang menyinggung Pemerintah Jepang, seperti berkomentar mengenai pengaruh Jepang yang menurun dalam komunitas internasional. Hal tersebut membuat Pemerintah Jepang kecewa dan membuat hubungan politik kedua negara mencapai titik terendah hingga akhir kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak di tahun 2013 (Moon Chung-In dan Won Young Hur, 2017).

Presiden Park Geun Hye sebagai pengganti kepemimpinan Presiden Lee yang kontroversial terhadap Jepang ternyata tidak merubah keadaan. Hubungan Korea Selatan dan Jepang belum membuahkan hasil yang maksimal, bahkan Presiden Park bertindak keras terhadap Jepang. Namun sikap keras yang ditunjukkan oleh Presiden Park dianggap sebagai permainan politik semata. Hal ini dilakukan karena Presiden Lee juga ingin meningkatkan popularitasnya terhadap masyarakat Korea Selatan (Jun, 2012). Ketegangan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang mulai membaik pada tahun 2015 karena adanya dorongan dari Amerika Serikat untuk segera memulihkan hubungan. Atas dasar inilah, Pemerintah Korea Selatan dan Jepang mulai melakukan upaya perbaikan hubungan politik dengan menyelesaikan isu *comfort women* serta membahas ulang kerjasama GSOMIA yang sebelumnya gagal dilaksanakan di tahun 2012.

Selama kurun waktu empat tahun, pembahasan mengenai pakta GSOMIA baru kembali dibuka pada era Park Geun Hye. Pada pembahasan putaran dialog pertama dilaksanakan di Tokyo pada tanggal 1 November 2016 (Hyung, 2016). Pada tahap ini tidak memerlukan waktu yang lama, karena pembahasan mengenai *general content* sudah pernah dibahas dan disepakati pada tahun 2012. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kementerian Korea Selatan yang menyatakan bahwa diskusi dilakukan untuk membahas isi umum berdasarkan teks perjanjian yang disepakati sementara pada tahun 2012. Tahap kedua putaran dialog *working level* dilaksanakan pada tanggal 9 November 2016. Pada tahap ini juga terjadi kesepakatan pada hampir seluruh bidang yang telah didiskusikan. Pemerintah Korea Selatan juga menyatakan telah memeriksa rancangan dengan seksama, sehingga perjanjian disepakati (Byong-Su, n.d.). Kemudian pada tanggal 23 November 2016, kerjasama GSOMIA akhirnya resmi disepakati oleh Korea Selatan. Pakta GSOMIA disetujui oleh Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye pada saat rapat kabinet yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2016. Kemudian kesepakatan resmi kerjasama GSOMIA akhirnya dilakukan sehari setelahnya di Seoul oleh Menteri Pertahanan Han Min-Koo dan Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan, Yasumasa Nagamine (Ju-Min, 2016).

Isi dari perjanjian GSOMIA pada tahun 2016 merujuk pada perjanjian GSOMIA pada tahun 2012, sehingga tidak mengalami perubahan secara signifikan. Baik Korea Selatan dan Jepang menganggap perjanjian ini penting dan telah sepakat untuk menandatangani kerjasama GSOMIA





karena mengingat adanya ancaman dari Korea Utara. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida bahwa :

“Cooperation between Japan and South Korea is becoming more important than ever in the security sphere as North Korea’s nuclear (development) and missiles pose a different level of threat from before” (Ju-Min, 2016)

(Kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan menjadi lebih penting dari sebelumnya di bidang keamanan karena pengembangan nuklir dan misil Korea Utara yang menimbulkan tingkat ancaman yang berbeda dari sebelumnya).

Namun demikian, keberhasilan Presiden Park Geun Hye dalam mewujudkan kesepakatan GSOMIA sebagai inisiatif perubahan kebijakan luar negeri sebelumnya, mendapatkan respon negatif dari lingkup domestik Korea Selatan. Respon negatif datang dari masyarakat Korea Selatan khususnya para solidaritas aksi *comfort women* karena *Comfort Women Agreement* yang merupakan bentuk rekonsiliasi Jepang terhadap penyintas *comfort women* belum dikatakan usai. Adanya ketidakpuasan solidaritas *comfort women* dikarenakan Jepang belum meminta maaf secara tulus kepada para korban (Kumagai, n.d.). Respon negatif juga semakin meningkat karena adanya skandal yang tengah dihadapi Park Geun Hye terkait korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan bersama Choi Soon Sil yang merupakan sahabat dekat Park Geun Hye (BBC, 2018). Selain itu, pihak parlemen juga menganggap kesepakatan GSOMIA terlalu cepat untuk disepakati terlebih Park Geun Hye sedang dalam skandal dan dianggap tidak sepatasnya membuat sebuah kebijakan (In-Hwan, 2016).

Dari survei yang dilakukan untuk menilai perspektif masyarakat Korea Selatan terhadap GSOMIA. Survei tersebut dilakukan pada masyarakat dengan rentang usia 20 tahun hingga 50 tahun. Sejumlah 59% dengan rentang usia 20-40 tahun masyarakat Korea Selatan tidak setuju dengan perjanjian GSOMIA dan sisanya memilih yang lain yakni, 31% menyetujui perjanjian GSOMIA, serta 10% memilih untuk tidak merespon (Gallup Report, 2016). Hal ini menunjukkan perjanjian GSOMIA tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari domestik Korea Selatan baik dari solidaritas *comfort women* maupun golongan muda. Perbedaan kebijakan yang diambil terhadap kesepakatan GSOMIA pada tahun 2012 dengan tahun 2016, menunjukkan adanya pertimbangan yang berbeda dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri meskipun dalam kondisi yang sama yakni adanya respon negatif dari domestik Korea Selatan. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya muncul rumusan masalah: Mengapa Korea Selatan akhirnya menyetujui perjanjian GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2016 ?





Kajian Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka akan digunakan kerangka berpikir *Model Rational Actor* oleh Graham T Allison yang digunakan untuk menganalisis keputusan yang diambil oleh suatu negara dalam membuat sebuah kebijakan luar negeri. Menurut Graham T Allison, Model Aktor Rasional diartikan sebagai seorang aktor yang berupaya membuat sebuah kebijakan yang dianggap paling rasional dengan memperhitungkan tujuan dan kalkulasi pemerintah. Dalam model Aktor Rasional terdapat empat inti, yakni *Goals/Objectives*, *Alternatives*, *Consequences* dan *Choice* (Setiawan, 2017).

Goals / Objectives diartikan sebagai kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara dari serangkaian konsekuensi jika diambil sebuah tindakan. Dalam hal ini, Korea Selatan mengambil sebuah keputusan luar negeri karena adanya kepentingan nasional yang sekaligus diikuti konsekuensinya. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah berkaitan dengan keamanan wilayah Korea Selatan untuk meminimalkan ancaman dari Korea Utara.

Sedangkan *Alternatives* diartikan seorang aktor rasional akan memilih serangkaian pilihan keputusan dalam situasi tertentu. Alternatif keputusan lain yang dapat diambil oleh Korea Selatan yakni dapat menunda kerjasama GSOMIA hingga permasalahan yang ditimbulkan oleh isu sejarah maupun skandal Park Geun Hye diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga Korea Selatan sebagai negara demokratis dapat dianggap menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan menerima opini atau aspirasi dari publik. Disisi lain, Korea Selatan juga telah banyak bekerjasama di bidang intelijen militer dengan 33 negara lainnya serta satu organisasi internasional yakni NATO. Berdasarkan beberapa rangkaian keputusan yang dapat diambil oleh pemerintah Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan memilih keputusan untuk melanjutkan dan menandatangani kesepakatan GSOMIA dengan Jepang dalam situasi masyarakat Korea Selatan tidak mendukung perjanjian tersebut (Sangbo, 2016).

Consequences adalah akibat dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor rasional. Aktor rasional menyadari adanya akibat dari pilihan keputusan yang diambil, sehingga aktor rasional akan mempertimbangkan keputusan yang dianggap rasional. Pemerintah Korea Selatan sebagai aktor rasional yang mengambil sebuah keputusan telah mempertimbangkan konsekuensinya dengan melihat keuntungan atau kepentingan dalam sebuah kesepakatan GSOMIA dengan Jepang.

Choice diartikan sebagai serangkaian keputusan rasional yang konsekuensi positifnya mendapatkan peringkat tertinggi diantara keputusan rasional lainnya. Dalam hal ini, Korea Selatan menghadapi beberapa keputusan yang akan diambil. Pertimbangan pertama Korea Selatan dalam menyepakati kesepakatan GSOMIA dititikberatkan pada keamanan wilayah Korea Selatan dari ancaman Korea Utara. Percobaan rudal balistik dalam kurun waktu 2010 hingga 2015 membuat kondisi keamanan Korea Selatan terancam dari Korea Utara (Laimheheriwa, 2015). Adanya peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara semakin tinggi, hal ini menyebabkan





kekhawatiran bagi Korea Selatan sebab keamanan wilayahnya terancam akibat agresivitas Korea Utara, sehingga faktor tersebut menyebabkan Korea Selatan menyepakati kerjasama GSOMIA dengan Jepang. Disisi lain, Jepang telah memiliki teknologi yang canggih seperti satelit pengintai, sistem radar, dan pesawat peringatan dini untuk mendeteksi rudal balistik Korea Utara. Dengan keunggulan teknologi Jepang, informasi intelijen dari Jepang diperlukan bagi Korea Selatan untuk menambah kekuatan militer Korea Selatan (Atmolv, 2019).

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif disebut juga metode baru karena popularitasnya dinilai masih baru. Pada awalnya metode penelitian ini lebih banyak digunakan pada ilmu antropologi budaya (etnographi). Namun dalam perkembangannya, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial, budaya dan tingkah laku manusia (Sugiyono, 2011). Adapun Tehnik Pengumpulan Data yang digunakan adalah melalui Studi Pustaka (*library research*) dengan pengumpulan informasi dan data penelitian melalui buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lain yang masih berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data yang diolah bersumber dari data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan situasi relevan atas fakta dan data untuk dihubungkan antar variabel, lalu diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan sehingga GSMIA disepakati pada era Lee Myung Bak.

Hasil dan Pembahasan

Melalui konsep model aktor rasional seorang aktor atau pembuat keputusan akan menentukan kebijakannya berdasarkan rasionalisasi yang dimiliki oleh aktor tersebut. Rasionalisasi yang merupakan proses berfikir secara logis didasarkan pada kalkulasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang aktor. Dalam hal ini, Presiden Park Geun Hye sebagai aktor rasional membuat keputusan untuk menyepakati kerjasama GSOMIA yakni kemampuan militer Jepang serta adanya peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara.

A. Kemampuan Militer Jepang

Dalam menghadapi situasi keamanan dunia, pada tahun 2013 Shinzo Abe berupaya untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Peningkatan kapabilitas militer Jepang bertujuan agar Jepang memiliki kemampuan militer yang mumpuni, sehingga Jepang mampu merespon ancaman yang datang dari luar. Peningkatan tersebut terlihat dari perubahan tatanan militer Jepang melalui *National Security Strategy* (NSS) (Santoso, 2016). NSS merupakan pedoman keamanan nasional yang pertama





kali diadopsi oleh Jepang berfokus pada hubungan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Dalam NSS terdapat prinsip dasar yang dikenal sebagai “*proactive contribution of peace*” yang bertujuan agar Jepang melakukan kontribusi secara aktif untuk mendukung stabilitas keamanan Asia Pasifik hingga dunia serta melakukan perombakan pada kebijakan pertahanan Jepang. NSS secara khusus menyebutkan bahwa kapabilitas pertahanan merupakan penjamin utama keamanan nasional Jepang. Oleh karena itu, Jepang berupaya membangun arsitektur pertahanan yang komprehensif untuk mendukung terwujudnya pertahanan Jepang yang kuat (Defense, 2016).

Untuk mendukung postur keamanan Jepang, NSS di era Shinzo Abe juga mengatur *National Defense Program Guideline* (NDPG) 2014 yang merupakan petunjuk program keamanan untuk jangka panjang dalam kurun waktu satu dekade serta *Mid-Term Defense Program* (MTDP) sebagai program keamanan jangka pendek dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2014 hingga 2018. Sedangkan dalam *Mid-Term Defense Program* (MTDP), salah satu fokusnya yakni pada jumlah peralatan atau amunisi masing-masing angkatan, yakni Angkatan Darat (*Ground Self Defense Force*), Angkatan Laut (*Maritime Self Defense Force*) dan Angkatan Udara (*Air Self Defense Force*) sebagai bentuk memperkuat sistem pertahanan Jepang (Ministry of Defense Japan, 2014). Sejak upaya Shinzo Abe meningkatkan kapabilitas militernya, hingga tahun 2016, total amunisi yang dimiliki oleh masing-masing angkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Aset Militer Jepang Tahun 2016

Kategori	Jenis Peralatan	Jumlah (aset)
Angkatan Darat	Tangki	687
	Kendaraan tempur infanteri	68
	Kendaraan pengintai	162
	Kendaraan lapis baja	792
	Artileri penarik	422
	Tembakan <i>self-propelled</i>	166
	Sistem Peluncur roket	99
	Mortir	1.103
	Misil <i>ground to air</i>	700
	Helikopter	412
Angkatan Laut	Pesawat terbang	8
	Kapal selam	18
	Destroyer	38
	Kapal pengawal	9
	Kapal penyapu ranjau	27
	Kendaraan <i>amphibious</i>	3
	Kapal pendaratan	8
Angkatan Udara	Kapal pembantu	28
	Helikopter	131
	Pesawat pengintai	17





Kategori	Jenis Peralatan	Jumlah (aset)
	<i>Fighters</i>	348
	Pesawat transport	61
	Tanki	5
	Helikopter	46
	Pesawat EW	3

Sumber : *Defense White Paper* Korea Selatan. 2016. “Military Power of Neighbour Country”. Diakses melalui

https://www.mnd.go.kr/cop/pblicitn/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN_031300000 pada 5 Agustus 2022.

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah peralatan militer pasukan keamanan Jepang cukup lengkap. Jumlah peralatan militer tersebut menunjukkan keseriusan Shinzo Abe dalam membangun kapabilitas militer Jepang yang kuat. Hal ini juga menandakan kesiapan Jepang dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar. Keputusan Shinzo Abe dalam meningkatkan kapabilitas militer Jepang berhubungan erat dengan anggaran atau pengeluaran negara yang digunakan untuk pengeluaran militer Jepang. Anggaran militer dihitung berdasarkan seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas militer termasuk pengeluaran untuk pasukan keamanan, pelatihan militer serta perlengkapan militer (NATO, 2021). Anggaran pengeluaran militer Jepang cenderung lebih besar dibandingkan dengan Korea Selatan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Anggaran Militer Jepang dan Korea Selatan tahun 2012-2016

Tahun	Jepang	Korea Selatan
2012	\$60,01 jt	\$31,95 jt
2013	\$49,02 jt	\$34,31 jt
2014	\$46,90 jt	\$37,55 jt
2015	\$42,11 jt	\$36,57 jt
2016	\$46,47 jt	\$36,89 jt

Sumber : Macro Trends. 2022. “South Korea Military Spending / Defense Budget 1960-2022. Diakses melalui <https://www.macrotrends.net/countries/KOR/south-korea/military-spending-defense-budget> pada 8 Agustus 2022.





∴

Dari Tabel 2 diatas, tampak bahwa secara umum Jepang memiliki anggaran belanja militer yang lebih besar dibandingkan dengan Korea Selatan. Secara distribusi, untuk Tahun anggaran belanja militer tahun 2016, pembagiannya meliputi 42,9% untuk *maintenance* yakni meliputi pendidikan dan pelatihan, perawatan medis, utilitas, *repair*, dan *petrol*. Selanjutnya 41% untuk *base measure* meliputi hibah komunitas, dukungan terhadap *host-nation*, serta sewa dan biaya kompensasi. Untuk penelitian dan pengembangan mendapatkan porsi sebesar 2,8%. Untuk pengadaan peralatan 3,3%, sedangkan untuk peningkatan fasilitas 3,6%, dan lainnya 6,4% (Ministry of Defense Japan, 2016).

Berdasarkan pemaparan fakta di atas mengenai program-program yang dilakukan oleh Shinzo Abe untuk menghadapi ancaman dari luar, menunjukkan bahwa Jepang memiliki kemampuan militer yang mumpuni. Hal ini dilihat dari perubahan dari tatanan militer Jepang seperti perubahan dasar kebijakan militer, jumlah peralatan militer yang cukup lengkap dan canggih, serta anggaran militer Jepang yang besar. Adanya kemampuan tersebut, menjadi pertimbangan Korea Selatan dalam menyepakati kerjasama GSOMIA antara lain terdapat pada aset pengawasan dan deteksi yang berkualitas. Dalam *Defense White Paper* Korea Selatan tahun 2016, Korea Selatan menyatakan harapannya dengan menyepakati kerjasama GSOMIA bersama Jepang disebabkan Jepang memiliki kemampuan militer seperti aset pengawasan dan deteksi yang canggih serta berkualitas didukung dengan *budget* militer yang besar (Ministry of National Defense Republic of Korea, 2016).

“Japan devotes a larger share of its national budget to defense than the ROK and possesses large, high-quality surveillance and detection assets including reconnaissance satellites, aegis ships, airborne early warning and control aircraft. hence, sharing video and other data with Japan, which possesses advanced intelligence-gathering and analyzing capabilities, can assist the ROK military in tracking and analyzing the trajectories of North Korean ballistic missiles and conducting technical analysis of its nuclear capabilities.” (Ministry of National Defense Republic of Korea, 2016).

(Jepang mencurahkan bagian yang lebih besar dari anggaran nasionalnya untuk pertahanan daripada Korea Selatan dan memiliki aset pengawasan dan deteksi yang besar dan berkualitas tinggi termasuk satelit pengintai, kapal aegis, pesawat terbang peringatan dini dan kontrol di udara. Oleh karena itu, berbagi video dan data lainnya dengan Jepang, yang memiliki kemampuan pengumpulan dan analisis intelijen tingkat lanjut, dapat membantu militer Korea Selatan dalam melacak dan menganalisis lintasan rudal balistik Korea Utara dan melakukan analisis teknis terhadap kemampuan nuklirnya)





Pemerintah Korea Selatan melihat kemampuan militer Jepang terutama melalui peralatan militer seperti satelit pengintai yang dapat menangkap gambar sekecil 30cm, *Aegis Destroyers* yang mampu mendeteksi radar dan mencegat rudal, *Airborne Early Warning* serta *Aircraft Control* sebagai aset yang canggih mampu mendeteksi aktivitas nuklir Korea Utara. Selain itu, Jepang juga memiliki radar darat dengan jangkauan minimal dapat dideteksi 1000 km serta 77 mesin bawah tanah yang dapat mendeteksi kapal selam, sehingga dengan kemampuan militer Jepang yang berkualitas, Korea Selatan mendapatkan informasi kredibel melalui skema kerjasama GSOMIA yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memantau pergerakan Korea Utara (Nayoon, 2016). Hal ini menguntungkan bagi Korea Selatan, sebab Korea Selatan belum memiliki mekanisme pertahanan seperti Jepang. Radar Korea Selatan pada tahun 2016 masih menggunakan *Swedish Arthur-K System* yang hanya dapat mendeteksi musuh sejauh 60 km (Ians, 2017). Oleh sebab itu, kemampuan militer Jepang menjadi salah satu alasan Korea Selatan menyetujui kerjasama GSOMIA dengan Jepang. Disisi lain, bagian Laut Timur yang tidak dapat dijangkau oleh Korea Selatan dapat dideteksi oleh Jepang, sebab Jepang memiliki radar X-Band yang ditempatkan di wilayah tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Defense White Paper Korea Selatan tahun 2016 sebagai berikut :

“Furthermore, the east Sea bordering Japan’s territorial waters is within the reachable range of its intelligence assets. Therefore, information exchange with Japan will give the ROK military access to better and broader intelligence related to the activities of North Korean submarines and submarine-launched ballistic missiles in this sea area”(Ministry of National Defense Republic of Korea, 2016)

(Selain itu, Laut timur yang berbatasan dengan perairan teritorial Jepang berada dalam jangkauan aset intelijennya yang dapat dijangkau. Oleh karena itu, pertukaran informasi dengan Jepang akan memberi ROK akses militer ke yang lebih baik dan intelijen yang lebih luas terkait dengan aktivitas kapal selam Korea Utara dan balistik yang diluncurkan kapal selam rudal di wilayah laut ini).

B. Peningkatan Aktivitas Nuklir dan Rudal Korea Utara

Perkembangan nuklir Korea Utara dipengaruhi oleh pemikiran Kim Il Sung yang menyatakan bahwa Korea Utara tidak perlu bergantung dengan negara lain, sebab Korea Utara akan mengembangkan nuklir sebagai bentuk pertahanan wilayahnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pada tahun 2010 Menteri Pertahanan Korea Utara menekankan kembali bahwa pengembangan senjata nuklir merupakan bagian dari *self defense* untuk mencegah serangan dari AS dan negara-negara aliansinya. Selain itu, Korea Utara juga menyatakan bahwa senjata nuklir yang dimilikinya





tidak hanya sebagai bentuk pertahanan diri (*deterrence*), namun juga sebagai *bargaining power* dalam berdiplomasi dengan negara-negara di dunia. (Irawan, 2017)

Disisi lain persepsi Korea Utara terhadap pengembangan nuklir sebagai bentuk perlindungan, justru membawa pengaruh buruk bagi stabilitas keamanan khususnya di kawasan Asia Timur. Oleh sebab itu, Korea Selatan dan negara-negara aliansinya berupaya melakukan denuklirisasi terhadap Korea Utara. Upaya denuklirisasi dilakukan baik oleh Korea Selatan maupun dengan negara-negara aliansi seperti AS dan Jepang. Sejak tahun 2003, upaya denuklirisasi dilakukan melalui forum *six party talks* yakni perundingan nuklir oleh enam negara AS, Jepang, Korea Selatan, Cina, Rusia dan Korea Utara. Tidak hanya melalui forum multilateral seperti forum *six party talks*, Korea Selatan sebagai negara yang secara langsung berhadapan dengan Korea Utara telah melakukan berbagai upaya denuklirisasi melalui kebijakan-kebijakan presiden di setiap kepemimpinan. Upaya denuklirisasi dilakukan baik melalui dialog, kerjasama maupun forum. Di setiap era kepemimpinan, presiden Korea Selatan selalu menempatkan ancaman Korea Utara sebagai fokus utama kebijakan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman Korea Utara menjadi satu hal yang penting untuk diwaspadai. Tidak terkecuali pada era Presiden Park Geun-hye yang juga melakukan upaya untuk denuklirisasi Korea Utara.

Namun demikian, upaya denuklirisasi yang ditujukan untuk meredam aktivitas nuklir Korea Utara tidak memberikan hasil yang positif. Forum pertemuan *dalam six party talks* juga tidak membuat Korea Utara melakukan denuklirisasi. Bahkan Korea Utara justru keluar dari forum tersebut. Presiden Kim Jong Un menyatakan bahwa untuk menghadapi senjata nuklir harus dilawan dengan senjata nuklir pula (Irawan, 2017). Respon negatif Korea Utara kembali dilakukan dengan meningkatkan aktivitas nuklirnya dari tahun ke tahun. Uji coba nuklir kembali meningkat terlihat pada rentang tahun 2012 hingga 2016. Pada April tahun 2012, Korea Utara meluncurkan roket melalui *Sohae Satellite Launching Station* di bagian barat daya wilayah Korea Utara. Pada peluncuran tahap pertama, terdiri dari empat rudal balistik jarak menengah *Nodong*, tahap kedua rudal balistik jarak menengah jenis BM-25 Musudan yang mengalami gagal luncur (ACA, 2022).

Pada tahun 24 Januari 2013, Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara kembali mengumumkan rencana uji coba nuklir dan peluncuran roket. Hal ini terbukti pada 12 Februari 2013, *The Comprehensive Test Ban Treaty Organization* (CTBTO), yakni organisasi yang berfokus untuk memverifikasi larangan uji coba nuklir, melihat adanya aktivitas seismik dengan karakteristik seperti ledakan di dekat wilayah uji coba nuklir Korea Utara tahun 2006 dan 2009. Di tahun ini, Korea Utara juga tengah berupaya mengembangkan reaktor nuklir di Yongbyon (Irawan, 2017). Ancaman dari Korea Utara kembali terlihat pada 21 Maret 2014 dengan menembakan 30 roket jarak menengah ke arah Laut Jepang. Atas penembakan tersebut, Korea Utara banyak dikecam oleh berbagai negara dan organisasi, termasuk Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa peluncuran rudal Korea Utara melanggar resolusi PBB. Namun, Korea Utara justru mengancam akan melakukan uji coba nuklir





dalam bentuk yang baru. Hal ini dicurigai bahwa bentuk ancaman baru tersebut berkaitan dengan membuat perangkat nuklir berukuran lebih kecil yang dapat diaplikasikan dalam rudal balistik. Tidak hanya itu, melalui citra satelit Korea Utara juga memperluas situs utama peluncuran roket. Hal ini memungkinkan Korea Utara untuk meluncurkan roket dengan muatan yang lebih banyak. Oleh sebab itu, Korea Selatan juga berupaya untuk melakukan uji coba rudal sebagai bentuk pertahanan dari ancaman Korea Utara (Irawan, 2017).

Peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara terjadi cukup signifikan pada tahun 2015 hingga 2016. Setidaknya pada bulan Februari 2015, Korea Utara telah melakukan dua kali uji coba, yakni uji coba kapal selam anti misil serta uji coba lima rudal balistik dari wilayah Wonsan. Hingga akhir tahun 2015, Korea Utara telah beberapa kali melakukan uji coba misil balistik melalui kapal selam. Puncaknya pada bulan Januari 2016, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir ke empat serta meledakkan bom hidrogen untuk pertama kalinya. Setelah beberapa kali gagal dalam uji coba Musudan misil, Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke lima pada bulan September 2016. Korea Utara juga menyatakan bahwa uji coba nuklir ke-enam akan segera dilakukan kembali setelah keberhasilan uji coba nuklir ke-lima. Hal ini membuat Korea Utara kembali dikecam oleh berbagai pihak internasional, sebab tidak hanya membahayakan stabilitas keamanan kawasan Asia Timur dan dunia, akan tetapi berbahaya pula bagi lingkungan sebagai dampak uji coba tersebut (Irawan, 2017).

Tabel 3.
Ancaman Korea Utara Tahun 2012 – 2016

Waktu	Aktivitas
April 2012	Peluncuran roket <i>Nodong</i> dan roket BM-25 <i>Musudan</i> .
Januari 2013	Uji coba nuklir dan peluncuran roket serta pengembangan reaktor nuklir di Yongbyon.
Maret 2014	Penembakan roket jarak menengah ke arah Laut Jepang.
Februari 2015	Uji coba kapal selam anti misil dan uji coba 5 rudal balistik dari wilayah Wonsan.
Januari 2016	Uji coba nuklir dan meledakkan bom hidrogen.
September 2016	Uji coba nuklir.

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022.

Untuk melihat alasan Park Geun-hye menyetujui kerjasama GSOMIA dapat dilihat dari serangkaian peningkatan aktivitas nuklir dan rudal milik Korea Utara yang terlihat dalam tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012-2016, Korea Utara telah melakukan uji coba





nuklir, bahkan semakin massif, antara tampak pada tahun 2016 terjadi 2 kali uji coba senjata nuklir. Situasi ini membuat Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan akan kemungkinan ancaman baru yang akan dilakukan oleh Korea Utara. Pada peluncuran uji coba nuklir pada tahun 2016 dilakukan secara berturut-turut hingga peluncuran rudal setidaknya 20 kali termasuk rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Dalam *Defense White Paper* Korea Selatan tahun 2016, menyebutkan bahwa setelah penyerangan tersebut membuat Menteri Pertahanan meninjau dan mengkaji kembali perlunya penguatan postur militer Korea Selatan, sehingga hal tersebut menjadi alasan Korea Selatan menyepakati kerjasama GSOMIA (Ministry of National Defense Republic of Korea, 2016). Korea Selatan melihat dengan adanya kerjasama GSOMIA dapat menghalau nuklir dan misil Korea Utara secara efektif seperti yang tercantum dalam *Defense White Paper* Korea Selatan tahun 2016 sebagai berikut :

“In November 2016, the ROK-Japan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) was concluded to effectively deter North Korean nuclear and missile threats by utilizing Japanese intelligence capabilities to enhance the ROK’s security benefits” (Ministry of National Defense Republic of Korea, 2016)

(Pada November 2016, *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) Korea Selatan-Jepang disimpulkan untuk secara efektif menangkal ancaman nuklir dan rudal Korea Utara dengan memanfaatkan kemampuan intelijen Jepang untuk meningkatkan manfaat keamanan Korea Selatan)

Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan keamanan Korea Selatan. Oleh sebab itu, perlu adanya perhitungan di situasi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan, Han Min-ko *“a necessary measure in a situation where North Korea’s nuclear and missile threats are becoming a reality”* (diperlukan perhitungan dalam situasi di mana ancaman nuklir dan rudal Korea Utara menjadi kenyataan). Oleh karena itu, aktivitas nuklir Korea Utara menjadi salah satu alasan Korea Selatan menyepakati kerjasama GSOMIA (Korea JoongAng Daily, 2016).

Kerjasama GSOMIA yang merupakan kerjasama secara khusus berfokus pada aktivitas nuklir Korea Utara menjadi salah satu alasan Presiden Park bersedia meninjau ulang kerjasama tersebut hingga mencapai kesepakatan pada pertengahan November 2016. Skema kerjasama GSOMIA yang memungkinkan Korea Selatan mendapatkan informasi mengenai aktivitas nuklir Korea Utara dapat mendukung sistem pertahanan yang ingin dicapai oleh pemerintah Korea Selatan dibawah kepemimpinan Presiden Park. Dalam merespon peningkatan aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara, Presiden Park menyatakan pemerintah akan menggunakan langkah-langkah yang lebih keras dan





efektif untuk menghadapi Korea Utara, termasuk dengan bekerjasama dengan negara-negara aliansi seperti Amerika dan Jepang (Arirang Issue, 2016).

Penutup

General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) merupakan kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang dalam bidang keamanan. Melalui skema kerjasama GSOMIA, kedua negara dapat berbagi informasi mengenai aktivitas nuklir Korea Utara yang tidak dapat dijangkau oleh masing-masing negara. Pada tahun 2012, kerjasama GSOMIA hampir mencapai kesepakatan, akan tetapi setelah adanya penolakan dari publik dan parlemen membuat kerjasama tersebut gagal dilaksanakan. Hal ini menunjukkan terdapat permasalahan domestik yang menghambat kesepakatan kerjasama GSOMIA.

Pada tahun 2016, kerjasama GSOMIA akhirnya disepakati meskipun penolakan dari publik dan parlemen terhadap kerjasama tersebut masih kuat. Presiden Park Geun-hye yang pada era tersebut menjabat sebagai presiden Korea Selatan, memiliki pertimbangan tersendiri hingga membuat kerjasama GSOMIA dapat disepakati. Melalui teori Model Aktor Rasional oleh Graham T Allison menjelaskan bahwa seorang aktor akan berupaya membuat sebuah kebijakan yang dianggap paling rasional dengan memperhitungkan tujuan dan kalkulasi pemerintah.

Untuk mengetahui latar belakang Presiden Park Geun-hye dalam menyepakati kerjasama GSOMIA digunakan indikator *Choice*, yakni karena kemampuan militer serta meningkatnya aktivitas nuklir dan rudal Korea Utara. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada rasionalisasi yang dilakukan oleh Presiden Park sebagai aktor rasional. Kedua faktor tersebut menjadi alasan Park Geun-hye akhirnya memilih untuk menyepakati kerjasama GSOMIA, meskipun terdapat penolakan secara domestik.

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam memutuskan kerjasama dengan negara lain terdapat alasan-alasan sebagai bentuk pertimbangan oleh pembuat kebijakan. Seorang aktor rasional memiliki berbagai informasi yang kemudian dikalkulasikan berdasarkan untung-rugi yang didapatkan apabila memilih salah satu kebijakan hingga diputuskan satu kebijakan. Oleh sebab itu, aktor rasional dalam hal ini ialah seorang presiden memiliki pengaruh yang besar terhadap proses *decision making*. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa perbedaan kepemimpinan akan menghasilkan kebijakan yang berbeda pula, meskipun dalam kondisi yang sama. Sebab, pertimbangan masing-masing aktor berbeda sesuai dengan rasionalisasi yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Dalam hubungan internasional, proses *decision making* yang dilakukan aktor rasional penting untuk diketahui sebab hal tersebut merupakan bagian dari perilaku negara sebagai aktor dalam hubungan internasional.





Daftar Pustaka

- ACA. (2022). *Chronology of US-North Korea Nuclear and Diplomacy*. <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron#2012>
- Al Syahrin, N. (2018). *Keamanan Asia Timur : Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas*. Komoyo Press.
- Arirang Issue. (2016). *President Park Geun-hye on North Korea*. <https://youtu.be/h6nbQe4u3Tk>
- Atmolv, K. (2019). *A Tense Time for Relations Between Japan and South Korea : The GSOMIA and Moon's Relations with USA*. <https://journalneo.org/2019/09/12/a-tense-time-for-relations-between-japan-and-south-korea-the-gsomia-and-moon-s-relations-with-the-usa/>
- BBC. (2018). *South Korea's Presidential Scandal*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-37971085>
- Byong-Su, P. (n.d.). *Seoul and Tokyo Agree on Major Terms Military Information Agreement*. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/769710.html
- Defense, M. of. (2016). *National Security Strategy*. https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/strategy/index.html
- Gallup Report. (2016). *Daily Opinion No.236 Korea-Japan Military Cooperation*. <http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=789>
- Genron NPO. (2013). *Japan & South Korea Joint Opinion Poll*. https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5263.html
- Hyung, G. Y. (2016). *South Korea and Japan First Hold Round of Talks on Military Info Sharing Agreement*. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/768470.html
- Ians. (2017). *Seoul Develops Radar System, to Detect Pyongyang Artillery*. <https://www.financialexpress.com/world-news/seoul-develops-radar-system-to-detect-pyongyang-artillery/639588/>
- In-Hwan, J. (2016). *Despite Criticism, South Korea Sign GSOMIA with Japan*. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/771627.html
- Irawan, S. (2017). Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang-Korea Selatan Menghadapi Nuklir Korea Utara. *Jurnal International & Diplomacy USNI, Vol.3 No.1*, 103.
- Ju-Min, P. (2016). *South Korea, Japan Agree Intelligence-Sharing on North Korea Threat*. <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-military-idUSKBN13I068>
- Jun, M. Y. (2012). *History Intrudes on Korea-Japan Security Cooperation*. <https://www.stimson.org/2012/history-intrudes-korea-japan-security-cooperation/>
- Korea JoongAng Daily. (2016). *Park Was Behind Rush to Conclude GSOMIA, Says Official*. <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3026296>
- Kumagai, N. (n.d.). *South Korea and Japan: Resolving the Comfort Women Issue*. 2020.
- Laimeheriwa, O. L. (2015). Analisis Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015). *Jurnal Korean War Kajian Strategis Dan Studi Keamanan*, 9.
- Ministry of Defense Japan. (2014). *Medium Term Defense Program*. https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/Defense_Program.pdf
- Ministry of Defense Japan. (2016). *Defense Program and Budget of Japan*.





- https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/280330.pdf
- Ministry of National Defense Republic of Korea. (2016). *Defense White Paper 2016*.
https://www.mnd.go.kr/cop/pblictctn/selectPublicationUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&categoryId=0&publicationSeq=777&pageIndex=1&id=mndEN_031300000000
- Moon Chung-In dan Won Young Hur. (2017). *A South Korean Perspective : Trilateral Co-operation : the Devil's in Domestic Politic*. https://www.globalasia.org/v12no1/cover/a-south-korean-perspective-trilateral-co-operation-the-devils-in-domestic-politics_chung-in-moon-won-young-hur
- NATO. (2021). *Defense of Expenditure of NATO Countries (2014-2021)*.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_184844.htm
- Nayoon, L. (2016). *GSOMIA: Beneficial But Was The Timing Right?* <https://keia.org/the-peninsula/gsomia-beneficial-but-was-the-timing-right/>
- Sangbo, P. (2016). *Implications of General Security of Military Information Agreement for South Korea*. <https://www.stimson.org/2016/implications-general-security-military-information-agreement-south-korea/>
- Santoso, R. dan A. A. B. P. (2016). The Shift and Continuity of Japanese Defense Policy : Revolutionary Enough ? *Journal of ASEAN Studies, Vol.4 No.2*, 163.
- Setiawan, A. dan E. S. (2017). *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. UMJ Press.
- Sheen Seongho dan Jina Kim. (2012). *What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact*.
<https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb176.pdf?file=1&type=node&id=3360>
- Shin-H. (2012). *Seoul Under Fire for Tokyo Military Pact*.
<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120628001308>
- Sugiyono. (2011). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DAN R&D* (ALFABETA (ed.); cetakan ke). ALFABETA.
- Taqwim, A. N. (2019). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14218> [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14218>
- Yoon, Yang Seung dan Setiawati. (2003). *Sejarah Korea Selatan Sejak Awal Berdiri Hingga Masa Kontemporer*. Gajah Mada Univ Press.

